

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh penduduk Indonesia yang menekankan pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini terjadi keseimbangan pembangunan dalam masyarakat¹. Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dipisahkan menyebabkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah kawasan perumahan dan permukiman.

Salah satu unsur kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah tempat tinggal atau rumah. Setiap individu membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dan berkumpul dengan keluarganya, disamping itu rumah digunakan investasi masa depan². Rumah merupakan kebutuhan utama manusia dan mempunyai peran penting dalam pembentukan watak serta kepribadian seseorang. (Mulyani, 2013).

Dengan pembangunan rumah yang berkualitas pastinya juga akan berpengaruh pada masyarakatnya³. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan yang layak dan sehat Hak wajib bagi

¹ Muhammad Ali. "Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional". (Jakarta: PT.UMTIMA. 2010) Hlm.19 diakses 4 mei 2022

² Indradi, Sjamsiar Syamsuddin. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek Pembangunan Nasional diakses 4 mei 2022

³ Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang diakses 2 maret 2022

semua warga negara Indonesia untuk memenuhi persyaratan kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah bertanggung jawab serta melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan program-program kebijakan pemerintah agar masyarakat bisa mempunyai tempat singgah yang baik serta menempati rumah yang layak agar tidak kumuh secara berjenjang.⁴

Kemiskinan merupakan masalah pertama yang harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan ini secara sistematis perlu dilakukan supaya seluruh warganegara bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, lebih baik seluruh yang berkepentingan dalam hal ini sangat diperlukan. Kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menyangkut kondisi pemukiman yang kurang layak, kurangnya sarana sanitasi dan air bersih dipermukiman kumuh yang menandakan minimnya asset fisik dan infrastruktur pada kelompok miskin, yang menjadi isu kemiskinan di perkotaan⁵.

Indonesia sendiri merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk Jiwa mencapai sekitar 272 juta jiwa. Jadi, dalam hal ini, Menjadikan Indonesia sangat rawan kepadatan penduduk, Masalah kualitas

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. diakses 8 april 2022

⁵<https://web.kominfo.go.id> diakses 8 april 2022

hidup yang memadai, Indonesia dalam keadaan darurat, kawasan permukiman dan kawasan kumuh tersebar di Wilayah yang berbeda.

Kawasan permukiman kumuh merupakan masalah klasik yang sudah sejak lama "menghantui" kota-kota besar. Umumnya kawasan permukiman kumuh (slum area) terbentuk karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, yang dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah laju urbanisasi yang tinggi, harga tanah mahal, dan keterbatasan kemampuan pelayanan dasar suatu kota dan atau belum tersedianya regulasi pengelolaannya.⁶

Meluasnya lingkungan kawasan permukiman kumuh di kota telah menimbulkan dampak pada penurunan kualitas lingkungan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, dan menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman. Untuk itu, masalah lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan ini perlu segera ditangani Kegiatan penelitian regulasi yang akan dilakukan di Wilayah Kota Depok untuk meningkatkan penanganan permukiman kawasan kumuh diperlukan instrument penganganannya yang komprehensif. Dengan adanya kebijakan tentang pengelolaan Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai pengendalian yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang seimbang dan adil.⁷

⁶ <https://dukcapil.kemendagri.go.id> diakses pada tanggal 19 mei 2022

⁷ Badan Pusat Statistik. 2018. "Kelurahan yang masuk kedalam kawasan kumuh dan besaran kawasan kumuh", diakses pada tanggal 22 Mei 2022

Dalam penyusunan peraturan walikota, Pemda bertanggung jawab atas terakomodirnya kepentingan masyarakat dan mengikut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), merujuk kepada tiga pilar utama yaitu akses kepada informasi, partisipasi dan keadilan. Peraturan walikota yang akan dibuat harus bisa mengatasi kenyataankenyataan dilapangan baik kondisi normative maupun faktual. Maka berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok No.591/250/Kpts/Bapp/Huk/2015, ditetapkan Kawasan Kumuh 132,72 Ha, tersebar di 11 kawasan pada 7 kecamatan. Pada tahun 2016 Satuan Kerja Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Depok telah melakukan verifikasi luasan kumuh yang telah ditetapkan dalam SK tersebut.⁸

Pemukiman kumuh menurut peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang satuan perumahan dan pemukiman dalam lingkungan wilayah Kabupaten/Kota yang di nilai kumuh karena masuk kriteria bangunan yang tidak layak, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi , dan kualitas bangunan serta fasilitas yang digunakan belum memenuhi syarat.⁹

Sedangkan di Jawa Barat sendiri tercatat terakhir penduduk pada tahun 2020 sekitar 49565.000. Dalam hal ini, orang Indonesia sangat rentan terhadap masalah kepadatan penduduk dan orang tidak dapat hidup layak. Kualitas

⁸ Surat Keputusan Walikota Depok No.591/250/Kpts/Bapp/Huk/2015 tentang penetapan kawasan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan. Diakses pada tanggal 18 mei 2022

⁹ peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 02/prt/m/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diakses pada tanggal 16 April 2022

hidup merupakan tugas pemerintah Indonesia yaitu dengan menerapkan Kota Bebas Kumuh (KOTAKU).

Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi, pemerintah menggunakan rencana “Kota Tanpa Kumuh” (KOTAKU) bertujuan untuk kota bebas kumuh merupakan untuk mengurangi kawasan kumuh dan kemudian membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Pemukiman Kembali (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam rencana tata kota tanpa permukiman kumuh, rencana pengelolaan permukiman kumuh diharapkan dikembangkan di tingkat Kota/Kabupaten dan dilembagakan di tingkat masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).¹⁰

Meningkatkan kualitas kawasan kumuh dengan menyediakan infrastruktur dan kegiatan, serta melaksanakan regulasi bersama untuk mengubah hidup bersih, masyarakat sehat dan mencegah perilaku kumuh, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Tanzil, 2020:60).

Menyikapi fenomena permukiman kumuh membutuhkan keterlibatan pemerintah. Melibatkan pemerintah melalui program kegiatan yang komprehensif, termasuk upaya peningkatan peran pemerintah untuk

¹⁰ Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Jakarta. Diakses pada tanggal 23 July 2022

mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai solusi alternatif penyelesaian permukiman kumuh di Indonesia. Pemberdayaan adalah konsep yang bertujuan memberi orang lebih banyak tanggungjawab untuk bekerja. Jika otorisasi dilakukan oleh pengusaha, pimpinan atau tim secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik maka akan berhasil. Konsep pemberdayaan terkait dengan konsep *community development dan community-based development*. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi permukiman kumuh, karena dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, masyarakat akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan sehingga dapat secara sukarela berpartisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. (Kholqi, 2020:2).

Pada hakikatnya permukiman kumuh terjadi akibat dari kurangnya sistem perencanaan terhadap tata ruang dan wilayah kota. Penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh menurut Khomarudin (1997: 83-112) adalah:

1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat, berpenghasilan rendah.
2. Sulit mencari pekerjaan.
3. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah.
4. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan.
5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta.
6. Disiplin warga yang rendah.

7. Kota sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha.
8. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

Permasalahan yang timbul dari Permukiman kumuh yang tidak segera teratasi akan berdampak pada luasnya Permukiman kumuh. Permukiman kumuh juga dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang buruk jika mereka tidak merencanakan tata ruang wilayahnya dengan baik dan tidak menyediakan fasilitas yang memadai perhatian pemerintah harus diberikan pada perencanaan penggunaan lahan kawasan dan Penyediaan sarana dan prasarana bila ditinjau secara fungsional.

Pihak yang berpartisipasi berharap dapat memberikan sebuah pengaruh positif untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam membenahi kota yang layak untuk dihuni bagi masyarakat serta meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan dan menjaga apa yang sudah dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang sudah berhasil dibangun,(SEDCJCK No.40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh).¹¹

Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yaitu pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, dan pencegahan tumbuh kembangnya permukiman

¹¹ Yuliani Sri dan Gusty Putri Dhini Rosyida. (2017). Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diakses pada tanggal 4 juni 2022

kumuh baru serta penghidupan yang berkelanjutan Kekumuhan suatu lingkungan dapat dilihat berdasarkan kriteria lingkungan kumuh itu sendiri.¹²

Kekumuhan suatu lingkungan dapat dilihat berdasarkan kriteria lingkungan kumuh itu sendiri.

Ada beberapa kawasan kriteria kawasan permukiman kumuh yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

No	Kriteria	Parameter
1	Bangunan Gedung	Ketidak teraturan bangunan
		Tingkat Kepadatan Bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang
		Kualitas bangunan yang tidak memenuhi Syarat
2	Jalan Lingkungan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan ataupun permukiman
		Kualitas permukaan jalan lingkungan Buruk
3	Penyediaan Air Minum	Ketidakterseediaannya akses aman air minum
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
4	Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limbah air hujan sehingga menimbulkan genangan
		ketidak tersediaan drainase
		Tidak terhubung dengan sistem drainase Perkotaan
		Tidak dipelihara sehingga menimbulkan limbah padat dan cair di dalamnya
		kualitas konstruksi drainase buruk

¹² Peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 di akses pada tanggal 3 april 2022

5	Pengelolaan air limbah	sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
		prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku
6	Pengelolaan persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
		Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
		Tidak menjaga sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
7	Proteksi Kebakaran	Sarana proteksi kebakaran
		Sarana proteksi kebakaran

Sumber: Diolah peneliti, 2022

Menurut data Departemen Umum Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2016 terdapat 4.444 permukiman kumuh di Indonesia dengan luas 35.291 hektar. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan tujuan pengurangan permukiman kumuh telah dinyatakan tujuan Semula tahun 2015 seluas 38431 Ha. Mungkin dapat dikatakan bahwa dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh, telah bekerja cukup efektif dengan penurunan permukiman kumuh di Indonesia. Peningkatan kualitas kawasan kumuh masih

terus dilakukan hingga 2019 sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 -2019.¹³

Dapat dikatakan bahwa dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh telah berjalan cukup baik dengan menurunnya kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Peningkatan kualitas permukiman kumuh ini masih berlangsung sampai tahun 2019 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 – 2019.

Kota Depok merupakan salah satu kota di Indonesia yang berdekatan dengan Ibu Kota Indonesia yaitu Kota Jakarta. Secara administrasi Kota Depok adalah kota strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata.¹⁴

Cepatnya laju perekonomian di Kota Depok ini sehingga semakin menambah daya tarik bagi masyarakat urban untuk menetap di kota ini. Masyarakat yang berpendapatan rendah memilih membangun tempat tinggal di kawasan illegal. Hal tersebut di karenakan membangun rumah di kawasan illegal dapat mengurangi biaya yang mereka keluarkan dalam membangun permukiman.¹⁵

¹³ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016 diakses pada tanggal 14 July 2022

¹⁴ <https://www.depok.go.id> diakses pada tanggal 17 Mei 2022

¹⁵ Maya Adita dan Susie Perbawasari. (2016). Proses Seleksi Lokasi Pada Program Pemberdayaan Wisata Di Kota Depok. diakses pada 5 July 2022

Dengan maraknya pembangunan di kawasan illegal mengakibatkan Kota Depok menyumbang angka yang cukup besar dalam besaran kawasan kumuh di Indonesia. Jumlah penduduk yang terus menaik secara signifikan setiap tahunnya makin memperburuk kondisi pola tata ruang permukiman yang ada, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sawangan	84 239	-	-	81 392	-	-	165 631	171 068	178 928
Bojongsari	67 822	-	-	65 860	-	-	133 682	138 070	135 661
Pancoran Mas	141 830	-	-	140 337	-	-	282 167	291 429	244 975
Cipayung	87 037	-	-	84 420	-	-	171 457	177 085	171 587
Sukmajaya	154 338	-	-	157 041	-	-	311 379	321 600	252 531
Cilodong	84 562	-	-	83 003	-	-	167 565	173 066	168 178
Cimanggis	163 834	-	-	160 509	-	-	324 343	334 989	252 014
Tapos	145 498	-	-	144 311	-	-	289 809	299 322	263 366
Beji	112 487	-	-	109 885	-	-	222 372	229 671	171 723
Limo	59 616	-	-	58 274	-	-	117 890	121 760	115 718
Cinere	71 839	-	-	72 199	-	-	144 038	148 766	101 654
Kota Depok	1 173 102	-	-	1 157 231	-	-	2 330 333	2 406 826	2 056 335

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya terdapat kenaikan jumlah penduduk di Kota Depok. Akibat dari terus meningkatnya jumlah penduduk akan berimplikasi pada padatnya penduduk yang ada di wilayah Kota Depok.¹⁶

¹⁶ <https://www.gamedia.com> diakses pada 3 maret 2022

Mengutip dari Kuswartojo (2005) menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permukiman kumuh merupakan tempat tinggal yang tidak untuk di tinggali atau tidak memenuhi syarat baik itu kondisi rumah, lingkungan, serta sarana dan prasarana. Kawasan permukiman kumuh di Kota Depok tersebar ke dalam sebelas kelurahan yang ada Di Kota Depok itu sendiri, dengan persentase luas wilayah kumuh yang beragam dari masing masing Kecamatan. Kecamatan Beji Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.

Maka untuk mengetahui profil Pemukiman Kumuh tersebut sebagai berikut;

1. Profil Kelurahan Beji

PERHITUNGAN TINGKAT KECUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi : JAWA BARAT
 Kab/Kota : DEPOK
 Kecamatan : BEJI
 Kawasan : RW 01, 03, 12

Luas SK : 2.75 Ha
 Luas Verifikasi : 2.75 Ha
 Jumlah Bangunan : 180 Unit
 Jumlah Penduduk : 612 Jiwa
 Jumlah KK : 206 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME OUTPUT			KONDISI AKHIR				
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	93.00	Unit	51.67%	3			Unit	93.00	Unit	51.67%	3	
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0			Ha	-	Ha	0.00%	0	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1.00	Unit	0.56%	0			Unit	1.00	Unit	0.56%	0	
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				17.22%							17.22%		
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0			Meter	-	Meter	0.00%	0	
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	280.00	Meter	23.33%	0	Jalan Lingkungan	100.0	Meter	180	Meter	15.00%	0	
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0.00%							0.00%		
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	110.00	KK	53.40%	3			KK	110.00	KK	53.40%	3	
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0			KK	-	KK	0.00%	0	
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				26.70%							26.70%		
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	Ha	100.00%	5			Ha	3	Ha	100%	5	
	b. Ketidakterdediaan Drainase	400	Meter	50.00%	1			Meter	400	Meter	50%	1	
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0			Meter	-	Meter	0%	0	
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	100	Meter	12.50%	0			Meter	100	Meter	13%	0	
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	200	Meter	25.00%	1			Meter	200	Meter	25%	1	
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				35.00%							35.00%		
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	58.00	KK	28.16%	1			KK	58.00	KK	28.16%	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	58.00	KK	28.16%	1			KK	58.00	KK	28.16%	1	
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				28.16%							28.16%		
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	206.00	KK	100.00%	5			KK	206.00	KK	100.00%	5	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	88.00	KK	42.72%	1			KK	88.00	KK	42.72%	1	
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	206.00	KK	100.00%	5			KK	206.00	KK	100.00%	5	
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				80.91%							80.91%		
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterdediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0			Unit	-	Unit	0.00%	0	
	b. Ketidakterdediaan Sarana Proteksi Kebakaran	165.00	Unit	91.67%	5			Unit	165.00	Unit	91.67%	5	
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				45.83%							45.83%		
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN		TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		31	
71 - 95 : KUMUH BERAT		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN	
45 - 70 : KUMUH SEDANG		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		33.40%		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		33.40%		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		33.40%	
19 - 44 KUMUH RINGAN		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%	
< 19, DINYATAKAN TIDAK KUMUH													

Dari data di atas dapat disimpulkan 644 jumlah bangunan rumah tidak memenuhi persyaratan Teknik (unit) , 5740 panjang jalan dengan permukaan rusak (Meter) , 27000 Panjang saluran drainase rusak (meter) , 3107 Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/ Aman, 177 Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis , 795 Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis.¹⁷

2. Profil Kelurahan Beji Timur

¹⁷ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: JAWA BARAT	Luas SK	3,20	Ha
Kab/Kota	: DEPOK	Luas Verifikasi	3,20	Ha
Kecamatan	: BEJI	Jumlah Bangunan	298	Unit
Kawasan	: RW 01, 04, 06	Jumlah Penduduk	1,075	Jiwa
		Jumlah KK	295	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	189.00	Unit	63.42%	3			Unit	189.00	Unit	63.42%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0			Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	39.00	Unit	13.09%	0			Unit	39.00	Unit	13.09%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21.14%							21.14%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0			Meter	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	480.00	Meter	26.67%	1			Meter	480	Meter	26.67%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				13.33%							13.33%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	213.00	KK	72.20%	3			KK	213.00	KK	72.20%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0			KK	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				36.10%							36.10%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	2	Ha	69.41%	3			Ha	2	Ha	69%	3
	b. Ketidakterdisebut Drainase	1,000	Meter	41.67%	1	Drainase	350	Meter	650	Meter	27%	1
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0			Meter	-	Meter	0%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	250	Meter	10.42%	0			Meter	250	Meter	10%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	250	Meter	10.42%	0	Drainase	265	Meter	-	Meter	0%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				22.21%							19.90%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0.00%	0			KK	-	KK	0.00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	18.00	KK	6.10%	0			KK	18.00	KK	6.10%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0.00%							0.00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	81.00	KK	27.46%	1			KK	81.00	KK	27.46%	1
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	92.00	KK	31.19%	1			KK	92.00	KK	31.19%	1
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	81.00	KK	27.46%	1			KK	81.00	KK	27.46%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				28.70%							28.70%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterdisebut Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0			Unit	-	Unit	0.00%	0
	b. Ketidakterdisebut Sarana Proteksi Kebakaran	285.00	Unit	95.64%	5			Unit	285.00	Unit	95.64%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				47.82%							47.82%	
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN					TOTAL NILAI		TOTAL NILAI		19			
71 - 95 : KUMUH BERAT												
45 - 70 : KUMUH SEDANG												
19 - 44 KUMUH RINGAN												
< 19, DINYATAKAN TIDAK KUMUH												
					TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN					
					RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		24.19%					
					KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%					
							TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN			
							RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		23.77%			
							KONTRIBUSI PENANGANAN		1.72%			

Dari data di atas dapat disimpulkan 742 Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis (Unit), 1530 Panjang jalan dengan permukaan rusak (meter), 2821 Panjang saluran drainase rusak (meter), 676 Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas atau aman, 51 Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis, 295 Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis.¹⁸

3. Profil Kelurahan Pondok Cina

¹⁸ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 diakses pada 15 July 2022

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: JAWA BARAT	Luas SK	3,40	Ha
Kab/Kota	: DEPOK	Luas Verifikasi	3,40	Ha
Kecamatan	: BEJI	Jumlah Bangunan	212	Unit
Kawasan	: RW 02, 05, 01	Jumlah Penduduk	788	Jiwa
		Jumlah KK	225	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR				
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN	NILAI	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	164.00	Unit	77.36%	5			Unit	164.00	Unit	77.36%	5	
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0			Ha	-	Ha	0.00%	0	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	49.00	Unit	23.11%	0			Unit	49.00	Unit	23.11%	0	
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				25.79%							25.79%		
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	478.00	Meter	9.94%	0			Meter	478.00	Meter	9.94%	0	
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1,276.00	Meter	26.53%	1			Meter	1,276	Meter	26.53%	1	
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				13.26%							13.26%		
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	225.00	KK	100.00%	5			KK	225.00	KK	100.00%	5	
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	225.00	KK	100.00%	5			KK	225.00	KK	100.00%	5	
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				100.00%							100.00%		
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	2.94%	0			Ha	0	Ha	3%	0	
	b. Ketidaktersediaan Drainase	700	Meter	20.43%	0			Meter	700	Meter	20%	0	
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0			Meter	-	Meter	0%	0	
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	2,005	Meter	58.52%	3			Meter	2,005	Meter	59%	3	
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,231	Meter	35.93%	1			Meter	1,231	Meter	36%	1	
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				18.89%							18.89%		
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	89.00	KK	39.56%	1			KK	89.00	KK	39.56%	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	95.00	KK	42.22%	1			KK	95.00	KK	42.22%	1	
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				40.89%							40.89%		
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	225.00	KK	100.00%	5			KK	225.00	KK	100.00%	5	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	17.00	KK	7.56%	0			KK	17.00	KK	7.56%	0	
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	225.00	KK	100.00%	5			KK	225.00	KK	100.00%	5	
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				66.67%							66.67%		
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	207.00	Unit	97.64%	5			Unit	207.00	Unit	97.64%	5	
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	207.00	Unit	97.64%	5			Unit	207.00	Unit	97.64%	5	
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				97.64%							97.64%		
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN						TOTAL NILAI				TOTAL NILAI		42	
71 - 95 : KUMUH BERAT						TINGKAT KEKUMUHAN				TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
45 - 70 : KUMUH SEDANG													
19 - 44 KUMUH RINGAN													
< 19, DINYATAKAN TIDAK RUMUH						RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		51.88%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		51.88%	
						KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%	

Dari data di atas dapat disimpulkan 158 Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis (Unit), 584 Panjang jalan dengan permukaan rusak (meter), 2726 Panjang saluran drainase rusak (meter), 225 Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas atau aman, 105 Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis, 225 Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis.¹⁹

4. Profil Kelurahan Kemirimuka

¹⁹ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2018 diakses pada 15 July 2022

Permukiman kumuh Kelurahan Kemirimuka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Kemirimuka

Jika dilihat dari keteraturan bangunan sebagian besar memiliki keteraturan yang baik, merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan rata-rata memiliki kelayakan fisik yang memadai.

b. Kependudukan

Kependudukan merupakan aspek utama yang sangat berpengaruh dalam setiap perencanaan yang dilakukan atau yang akan dianalisis. Penduduk mempunyai predikat sebagai subjek dan objek dalam perencanaan. Penduduk sebagai subjek, yaitu penduduk tersebut yang berperan dalam mengadakan perencanaan sedangkan sebagai objek, penduduk yang merasakan setiap hasil dari perencanaan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu setiap pengetahuan dan tingkah laku penduduk sangat berperan dalam proses perencanaan.

Demografi dan kependudukan di Kawasan Perencanaan terbagi atas beberapa klasifikasi yang dilihat dari tiap-tiap RW yang berada di Kelurahan Kemirimuka, klasifikasi tersebut antara lain: jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan dan sebaran penduduk, mata pencaharian. Data demografi dan kependudukan tersebut bersumber dari tiap-tiap profil Kelurahan di Kelurahan Kemirimuka

a. Fasilitas dan pemanfaatan

Prasarana yang ada di Kelurahan Kemirimuka dilihat dari aspek aksesibilitas jalan lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum yang belum terlayani oleh PDAM, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan bahaya kebakaran.

Jaringan listrik di Kelurahan Kemirimuka mayoritas rumah tangga menggunakan daya listrik 900 Watt setiap unitnya. Untuk pelayanan jaringan listrik sudah terlayani diseluruh wilayah Kelurahan Kemirimuka.²⁰

5. Profil Kelurahan Kukusan

No.	Lokasi Kawasan Kumuh		Keterangan (SK Bupati)
	Lokasi	Luas (Ha)	
1	RT001-RW001	0.9	Hasil Baseline
2	RT002-RW001	2.4	Hasil Baseline
3	RT003-RW001	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis 1.6	Hasil Baseline
4	RT004-RW001	1.0	Hasil Baseline
5	RT005-RW001	1.9	Hasil Baseline
6	RT006-RW001	0.9	Hasil Baseline
7	RT007-RW001	1.7	Hasil Baseline
8	RT001-RW001	0.9	Hasil Baseline
9	RT002-RW001	2.4	Hasil Baseline
10	RT003-RW001	1.6	Hasil Baseline
11	RT004-RW001	1.0	Hasil Baseline
12	RT005-RW001	1.9	Hasil Baseline
13	RT006-RW001	0.9	Hasil Baseline
14	RT007-RW001	1.7	Hasil Baseline
	Jumlah	10.4	

²⁰ RP2KPKP KOTA DEPOK 2019 halaman IV-50

396 Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis (Unit) , 1103 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan , 0 Panjang saluran drainase rusak (meter) , 17 Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas atau aman , 74 Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis , 314 Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis.²¹

6. Profil Kelurahan Tanah Baru

No.	Lokasi Kawasan Kumuh		Keterangan (Hasil Baseline)
	Lokasi	Luas (Ha)	
1	RT001-RW002	1.5	Hasil baseline
2	RT002-RW002	4.4	Hasil baseline
3	RT003-RW002	2.0	Hasil baseline
4	RT004-RW002	3.9	Hasil baseline
5	RT005-RW002	2.0	Hasil baseline
6	RT006-RW002	2.0	Hasil baseline
7	RT007-RW002	1.6	Hasil baseline
8	RT008-RW002	5.3	Hasil baseline
Jumlah		22.7	

548 Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis (Unit) , 639 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan , 7000 Panjang saluran drainase rusak (meter) , 60 Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas atau aman , 660

²¹ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 diakses pada tanggal 23 juni 2022

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis , 820 Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis.²²

Kawasan kumuh akan bertambah jika Tidak ditangani secara inovatif, komprehensif dan tepat sasaran.²³ Maka pemerintah pusat mengambil langkah untuk mengatasi Permasalahan tersebut dengan membuat program.

Upaya strategis yang dirancang oleh Direktorat Bina Permukiman, Direktorat Cipta Karya untuk menangani Permukiman kumuh khususnya di perkotaan, termasuk dicanangkannya program KOTAKU untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan cara Meminimalisir masuk ke kriteria kumuh yang tertuang dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Masyarakat (berbasis masyarakat) KOTAKU Program akan mengelola permukiman kumuh dengan menciptakan platform kolaboratif dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat.²⁴

Sebagaimana tujuan kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka program KOTAKU akan menangani kawasan permukiman kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah serta peran masyarakat.

²² Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 diakses pada tanggal 26 april 2022

²³ Budiharjo, E. (2006). Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Bandung: PT. Alumni. Diakses pada tanggal 22 mei 2022

²⁴ Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 diakses pada tanggal 16 maret 2022

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, tersebar di 269 provinsi/kota, di 11067 desa/kelurahan Sasaran lokasi program KOTAKU adalah seluas 24650 ha yang berdasarkan SK (SK) kawasan kumuh yang diatur oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota Untuk mempercepat pengelolaan permukiman kumuh, program KOTAKU akan melaksanakan peningkatan kualitas, mengelola dan mencegah terjadinya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan sebagai berikut: kegiatan di desa/kelurahan, wilayah dan kabupaten/kota kegiatan pengelolaan permukiman kumuh termasuk pembangunan infrastruktur serta dukungan sosial dan ekonomi dalam rangka keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di permukiman kumuh. disosialisasikan kepada pemerintah daerah yang wilayahnya berada di wilayah pemrosesan program KOTAKU pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta.²⁵

Sesuai dengan amanat Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Adapun Dinas yang spesifik menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Depok adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (DISRUMKIN), selain itu juga DISRUMKIN bekerja sama kepada para LKM di Kota Depok yang wilayahnya masuk kedalam kawasan kumuh untuk menksukseskan program pemerintah serta menjawab tantangan Depok bebas kumuh 2019. Setiap tahunnya terdapat beberapa kawasan yang menjadi prioritas penanganan di Kota Depok.²⁶ Metode penanganan pada lingkungan

²⁵ Direktorat pengembangan Kawasan pemukiman diakses pada tanggal 23 maret 2022

²⁶ Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Depok diakses pada tanggal 1 july 2022

yang di anggap kumuh wilayah Kota Depok diprioritaskan pada kawasan kumuh yang memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Harus termasuk dalam lokasi kumuh yang terdapat pada Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591 Tahun 2015;
2. Kondisi kelembagaan masyarakat mendukung atau Badan Keswadayaan Masyarakatnya memadai;
3. Status kinerja keuangan sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat minimal memadai;
4. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman sudah tersusun dan disahkan;
5. Tidak ada penyalahgunaan keuangan yang belum terselesaikan;
6. Tidak berada di lokasi ilegal;
7. Tersedia detail engineering design (ded).

Pada tahun 2018 pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 4,8 miliar yang diperoleh dari Bantuan Dana Investasi (BDI) *National Slum Upgrading Program* (NSUP), untuk menjalankan program KOTAKU di wilayah Kota Depok. Salah satu kelurahan yang menerima anggaran dari program KOTAKU ini yaitu kelurahan Depok, Kelurahan Depok dirasakan perlu untuk menerima bantuan anggaran tersebut. Didalamnya, sehingga pemerintah merasa perlu melakukan perbaikan terkait pola tata ruang permukiman yang ada di Kelurahan Depok itu sendiri.

Nantinya tiap kelurahan memiliki data daerah mana yang memang harus mendapatkan perhatian penting dari program Kotaku.²⁷ Namun dalam penanganan Kawasan kumuh di kota Depok di akui belum terlaksana secara maksimal. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan kualitas penanganan Kawasan pemukiman kumuh.

Namun disisi lain, penulis menjumpai fakta fakta terkait permasalahan yang ada di program kotaku ini yaitu :

Pertama, sebagaimana informasi yang dipublikasi dalam website Kotaku Depok dalam laporan bulanan resmi pengaduan masyarakat, peneliti melihat adanya keluhan dari masyarakat terkait Program kotaku ini. hal ini sebagaimana dikatakan oleh masyarakat berdasarkan laporan bulanan dari pengaduan BKM atau perwakilan masyarakat program kotaku.

Kedua, Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan ketika magang di program kotaku ini, hasil komunikasi langsung dengan Asisten Kota Mandiri mengatakan bahwa program kotaku ini sedang berjalan pembenahan di berbagai kelurahan didepok dan adanya pembenahan Infrastruktur Sarana dan Prasarana yang di rencanakan oleh pemerintah depok.

Ketiga, masih dengan hasil observasi penulis langsung dengan Bendahara atau pendamping BPM dan CFW dan juga laporan bulanan terkait pengaduan dana dari pemerintah walikota depok situs resmi program kotaku

²⁷ Radar depok.com diakses pada tanggal 24 april 2022

terkait maladministrasi karena tahun 2020-2021 adanya pandemi maka dari itu penundaan program di berbagai kelurahan di tunda sementara atau adanya Maladministrasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Depok (Studi pada Kecamatan Beji). Alasan penulis mengambil judul ini untuk mendalami Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Depok (Studi pada Kecamatan Beji) dikarenakan program ini penting untuk terus dijalankan karena dalam melakukan atau melaksanakan program kotaku di kota depok yang apabila berjalan efektif dapat menurunkan pemukiman kumuh dan membantu pemerintah dalam menurunkan pemukiman kumuh di kota depok khususnya kecamatan beji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bagaimana Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Depok (Studi pada Kecamatan Beji)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas yang sudah dijabarkan, maka yang di ingin di capai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Depok (Studi pada Kecamatan Beji).

1.4 Manfaat Penelitian

Berkenan dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam partisipasi masyarakat program pemerintah.
- B. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai paham dan masukan kepada pemerintah khususnya Pusat Data dan Informasi sebagai bahan evaluasi dan acuan agar kedepannya pelaksanaan mengenai program pemerintahan menjadi lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta membagikan arah pada setiap bab yang berisi materi terkait dalam penulisan. Maka penulis memerlukan kerangka

penelitian yang sistematis. Sistematika penulisan ini bisa dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini berisi mengenai hal-hal yang menyangkut latar belakang masalah yang menjadi utama, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Didalam bab ini berisi mengenai teori serta konsep yang menjadi landasan dari penelitian yang diambil dari beberapa literatur yang relevan dan akurat dengan disertasi riset tipe yang lain.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Didalam bab ini berisi mengenai metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian sesuai dengan metode yang diusulkan.

BAB IV PEMBAHASAN

Didalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai hasil penelitian terhadap Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Depok (Studi pada Kecamatan Beji).

BAB V KESIMPULAN

Didalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang diajukan oleh peneliti.